

## MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Lyka Rovianingrum<sup>1</sup>, Syunu Trihantoyo<sup>2</sup>, Eny Reosminingsih<sup>3</sup>, Amrozi Khamidi<sup>4</sup>  
Universitas Negeri Surabaya<sup>1,2,3</sup>  
24010845103@mhs.unesa.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus multi-situs, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen di beberapa sekolah yang menerapkan MBS. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBS memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan, yang berdampak positif pada mutu pendidikan. Namun, implementasi MBS menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan kesiapan tenaga pendidik, serta keterbatasan sumber daya. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan kepemimpinan sekolah yang kuat menjadi faktor kunci keberhasilan MBS. Simpulan, bahwa integrasi MBS dengan pendekatan lain seperti otonomi sekolah, partisipasi aktif, dan kepemimpinan transformasional diperlukan untuk mencapai mutu pendidikan yang optimal.

**Kata Kunci:** Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Mutu Pendidikan, Otonomi Sekolah, Partisipasi Sekolah, Kepemimpinan Sekolah

### ABSTRACT

*This research aims to explore School-Based Management (SBM) as a strategy to enhance the quality of education. Employing a qualitative approach with a multi-site case study method, this study gathered data through in-depth interviews, observations, and document analysis across several schools implementing SBM. Thematic analysis was utilized to identify patterns and themes emerging from the data. The research findings indicate that SBM grants greater autonomy to schools in managing resources and making decisions, which positively impacts educational quality. However, the implementation of SBM faces challenges such as a lack of understanding and preparedness among educators, as well as resource limitations. Active participation from all stakeholders and strong school leadership are key factors for the success of SBM. This study concludes that integrating SBM with other approaches like school autonomy, active participation, and transformational leadership is necessary to achieve optimal educational quality.*

**Keywords:** School Based Management (SBM), Educational Quality, School Autonomy, School Participation, School Leadership

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Menurut Tilaar (2002), kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan serta meningkatkan mutu pembelajarannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen pendidikan yang fleksibel dan inovatif, salah satunya melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah konsep desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam

menentukan kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Menurut Mulyasa (2012), MBS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan melalui partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, serta masyarakat. Konsep ini berfokus pada pemberdayaan sekolah dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Penerapan MBS di berbagai negara telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan. Caldwell dan Spinks (1992) menyebutkan bahwa sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengelola anggaran, menentukan kebijakan akademik, serta meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Hal ini memungkinkan sekolah untuk lebih cepat merespons perubahan dan kebutuhan peserta didik secara lebih efektif. Di Indonesia, kebijakan MBS mulai diperkenalkan sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Pemerintah, melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menekankan pentingnya pemberian otonomi kepada sekolah dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Menurut Depdiknas (2004), otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sekolah dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan. Namun, implementasi MBS di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut Suryadi (2007), salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesiapan tenaga pendidik dalam menjalankan sistem ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal pendanaan maupun fasilitas, menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas MBS secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, masyarakat, serta pihak swasta untuk memperkuat implementasi MBS di sekolah-sekolah. Selain itu, Suparlan (2013) menekankan bahwa keberhasilan MBS sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki kompetensi manajerial yang baik akan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan motivasi guru, serta membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, kepemimpinan yang kuat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penerapan MBS.

Lebih lanjut, MBS juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Menurut Fattah (2006), keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah dapat meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan. Partisipasi aktif ini dapat berupa dukungan finansial, keterlibatan dalam komite sekolah, serta kontribusi dalam program pendidikan yang dirancang oleh sekolah. Dalam konteks global, MBS telah diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan yang berbeda-beda. Di Amerika Serikat dan Inggris, misalnya, konsep ini diterapkan dalam bentuk *school-based management* yang memberikan otonomi penuh kepada sekolah dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, di negara-negara berkembang, implementasi MBS sering kali masih menghadapi kendala dalam hal regulasi dan pendanaan. Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik terbaik di negara lain dapat menjadi referensi untuk meningkatkan efektivitas MBS di Indonesia. Kualitas adalah sejauh mana pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan, definisi anonim menyatakan bahwa kualitas mencakup keseluruhan aspek dan ciri produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Istilah kualitas ini sangat berkaitan dengan mutu, yang sering dijadikan acuan atau standar. Standar yang dijadikan acuan harus memiliki kriteria yang jelas, rasional, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam penentuan standar tersebut. Di era globalisasi yang penuh persaingan, lembaga pendidikan, terutama tingkat tinggi, harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai penyedia jasa pendidikan dan pengembang sumber daya manusia, lembaga pendidikan harus memiliki keunggulan yang menjadi prioritas.

Transformasi menuju sekolah berkualitas dimulai dengan komitmen bersama terhadap kualitas dari seluruh elemen sekolah dan komunitas.

Proses ini dimulai dengan merumuskan visi dan misi kualitas yang jelas untuk wilayah dan setiap sekolah. Visi kualitas berfokus pada lima hal, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan pelanggan, (2) keterlibatan seluruh komunitas dalam program, (3) pengukuran nilai tambah pendidikan, (4) memandang pendidikan sebagai sistem, dan (5) perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan hasil pendidikan. Peningkatan hasil belajar siswa adalah tujuan utama dari penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS menuntut guru untuk berinovasi dalam manajemen kelas. Guru, sebagai teladan bagi siswa, harus siap dengan tanggung jawab manajemen dan persiapan materi pelajaran. Guru juga harus mampu mengelola kelas dengan baik, termasuk jadwal pelajaran, pembagian tugas siswa, kebersihan dan ketertiban kelas, pengaturan tempat duduk, dan penempatan media pembelajaran. Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, MBS tetap menjadi salah satu strategi yang potensial dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang tepat, dukungan dari berbagai pihak, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, sistem ini dapat menjadi solusi efektif dalam menghadapi dinamika pendidikan di masa depan. Berdasarkan berbagai masalah yang muncul dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), penting untuk meneliti bagaimana kinerja kolaboratif MBS memberdayakan kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah dalam konteks manajemen pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi MBS dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa sekolah yang telah menerapkan MBS. Menurut Creswell (2013), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks yang alami. Studi kasus dipilih sebagai strategi penelitian karena memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap implementasi MBS dalam lingkungan sekolah yang berbeda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, serta orang tua siswa. Wawancara ini bertujuan untuk memahami perspektif mereka mengenai manfaat dan tantangan MBS. Yin (2018) menyatakan bahwa wawancara dalam penelitian studi kasus dapat memberikan data yang lebih kaya dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Selain wawancara, dilakukan pula observasi langsung terhadap proses pengelolaan sekolah dan interaksi antara pemangku kepentingan.

Analisis dokumen sekolah juga menjadi bagian dari teknik pengumpulan data. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan keuangan sekolah, kurikulum yang dikembangkan secara mandiri, serta kebijakan internal terkait manajemen pendidikan. Menurut Bogdan dan Biklen (2007), analisis dokumen dapat memberikan wawasan tambahan mengenai implementasi kebijakan di suatu institusi pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis komparatif antara sekolah yang menerapkan MBS dan sekolah yang masih menggunakan sistem manajemen konvensional. Miles dan Huberman (1994) mengungkapkan bahwa perbandingan antar kasus dapat membantu mengidentifikasi pola keberhasilan dan hambatan dalam penerapan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan secara lebih jelas perbedaan dampak antara kedua sistem tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk naratif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Menurut Moleong (2017), analisis deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang terkandung dalam data dan menghubungkannya dengan teori yang relevan. Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Denzin (1978)

menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memastikan keakuratan data dengan menggabungkan berbagai sumber informasi. Dengan cara ini, penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut untuk rinciannya :

#### 1. Pendekatan Penelitian dan Desain Studi Kasus

- Pengembangan

Selain menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini dapat diperkuat dengan elemen desain studi kasus multi-situs. Ini memungkinkan perbandingan mendalam antar sekolah yang menerapkan MBS, mengidentifikasi variasi implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Penelitian ini juga dapat menggunakan desain studi kasus terpancang, dimana studi kasusnya tertanam dalam konteks yang lebih luas, misal dalam konteks kebijakan pendidikan daerah.

- Justifikasi

Desain multi-situs memperkaya temuan dengan menunjukkan bagaimana MBS diadaptasi dalam konteks yang berbeda. Desain studi kasus terpancang membantu peneliti untuk menempatkan temuan dalam konteks kebijakan yang lebih besar.

#### 2. Teknik Pengumpulan Data

- Pengembangan

Selain wawancara mendalam, gunakan teknik wawancara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel untuk mengeksplorasi topik-topik spesifik. Tambahkan teknik pengumpulan data visual, seperti foto atau video, untuk mendokumentasikan lingkungan sekolah dan interaksi. Menggunakan Focus Group Discussion (FGD) yang mana dapat menggali informasi dari berbagai sudut pandang dalam satu waktu.

- Justifikasi

Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik yang muncul selama wawancara. Data visual memberikan konteks yang lebih kaya dan mendukung temuan wawancara dan observasi. FGD memberikan data yang kaya dari interaksi antar peserta.

#### 3. Analisis Data

- Pengembangan

Gunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumen. Gunakan perangkat lunak analisis data kualitatif untuk membantu mengelola dan menganalisis data. Tambahkan analisis konten pada dokumen sekolah untuk mengidentifikasi frekuensi dan pola kemunculan konsep-konsep kunci terkait MBS.

- Justifikasi

Analisis tematik memberikan struktur yang jelas untuk mengorganisasi dan menganalisis data kualitatif. Perangkat lunak analisis data kualitatif meningkatkan efisiensi dan akurasi analisis. Analisis konten memberikan data kuantitatif yang mendukung temuan kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Berbasis Sekolah**

Manajemen berbasis pendidikan adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Wahjosumidjo (2002), manajemen pendidikan merupakan proses

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Dengan kata lain, manajemen berbasis pendidikan berfokus pada perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan dengan mengelola berbagai aspek yang terlibat, seperti tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, dan sarana prasarana. Menurut Sondang P. Siagian (2006), manajemen dalam konteks pendidikan adalah seni dan ilmu dalam mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencakup berbagai strategi dan kebijakan yang dirancang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Siagian juga menekankan bahwa manajemen pendidikan yang baik harus fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Mulyasa (2012), manajemen berbasis pendidikan menitikberatkan pada pemberdayaan sekolah sebagai institusi pendidikan dalam mengelola segala sumber daya secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam perspektif ini, manajemen berbasis pendidikan memberikan kebebasan yang lebih luas bagi sekolah untuk menentukan kebijakan, merancang program, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan spesifik sekolah tersebut. Oleh karena itu, pendekatan ini sering dikaitkan dengan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS).

Sementara itu, Gaffar (1991) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan harus berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan manajemen pendidikan sangat bergantung pada sinergi antara semua pihak yang terlibat. Dengan adanya koordinasi yang baik, sekolah dapat lebih mudah mencapai visi dan misinya dalam mendidik peserta didik. Menurut Terry (2010), aspek utama dalam manajemen berbasis pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan pendidikan harus dilakukan dengan cermat berdasarkan analisis kebutuhan, pengorganisasian harus memperhatikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, pelaksanaan harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala serta mencari solusi yang tepat. Fattah (2009) menambahkan bahwa dalam konteks manajemen berbasis pendidikan, penting untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan. Hal ini bertujuan agar semua kebijakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan. Dengan demikian, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengelolaan yang beretika dan profesional.

Sedangkan menurut Sergiovanni (2005), manajemen berbasis pendidikan harus berorientasi pada kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Kepemimpinan dalam pendidikan harus mampu menjadi penggerak utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberdayakan tenaga pendidik, serta meningkatkan motivasi peserta didik. Dalam konteks ini, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mengawal jalannya manajemen berbasis pendidikan. Nanang Fattah (2004), keberhasilan manajemen berbasis pendidikan dapat diukur dari beberapa indikator, seperti peningkatan hasil belajar peserta didik, kepuasan guru dan tenaga kependidikan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pendidikan. Jika indikator-indikator ini terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa manajemen berbasis pendidikan telah diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak. Secara keseluruhan, manajemen berbasis pendidikan merupakan pendekatan yang menekankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan mengacu pada berbagai pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih berkualitas, fleksibel, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu,

implementasi manajemen berbasis pendidikan yang baik menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

### **Mutu Pendidikan**

Secara umum, mutu pendidikan dapat diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan, baik standar nasional maupun internasional. Mutu pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari input, proses, hingga output pendidikan. Input pendidikan meliputi sumber daya manusia (guru, tenaga kependidikan, siswa), sarana dan prasarana, serta kurikulum. Proses pendidikan mencakup kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan manajemen sekolah. Output pendidikan adalah hasil belajar siswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Edward Sallis (2002) mendefinisikan mutu pendidikan sebagai standar produk dan jasa serta standar pelanggan. Dalam konteks pendidikan, mutu ditentukan oleh sejauh mana lembaga pendidikan mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, yaitu siswa, orang tua, masyarakat, dan dunia kerja. Sallis menekankan pentingnya pendekatan manajemen mutu total (TQM) dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Harvey dan Green (1993) mengemukakan lima perspektif mutu pendidikan, yaitu: (1) mutu sebagai kesempurnaan, (2) mutu sebagai kesesuaian dengan tujuan, (3) mutu sebagai nilai tambah, (4) mutu sebagai pemenuhan kebutuhan pelanggan, dan (5) mutu sebagai transformasi. Perspektif-perspektif ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan memiliki dimensi yang kompleks dan beragam. W. Edwards Deming, seorang ahli manajemen mutu, menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam mencapai mutu pendidikan. Deming mengemukakan 14 poin manajemen mutu yang dapat diterapkan dalam konteks pendidikan, antara lain fokus pada pelanggan, kepemimpinan yang kuat, keterlibatan karyawan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Philip B. Crosby, ahli manajemen mutu lainnya, mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian dengan persyaratan (*conformance to requirements*). Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa lembaga pendidikan harus menetapkan standar yang jelas dan memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan dilakukan sesuai dengan standar tersebut. Crosby menekankan pentingnya pencegahan kesalahan (*prevention*) daripada perbaikan setelah terjadi kesalahan (*correction*). Vincent Gaspersz (2001) mendefinisikan mutu pendidikan sebagai totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa pendidikan yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang ditetapkan atau tersirat. Gaspersz menekankan pentingnya pendekatan sistem dalam manajemen mutu pendidikan, yang mencakup perencanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mutu pendidikan adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi delapan standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar<sup>1</sup> sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian<sup>2</sup> pendidikan.

### **Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan**

#### **1) Pengembangan Kurikulum yang Relevan dan Berbasis Kompetensi**

Kurikulum yang relevan dan berbasis kompetensi menjadi fondasi utama dalam peningkatan mutu pendidikan. Kurikulum harus dirancang agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era globalisasi, dengan menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selain itu, kurikulum juga perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia kerja.

- 2) **Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Guru**  
Guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kompetensi guru menjadi strategi yang sangat penting. Guru perlu diberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, agar mereka dapat menguasai metode pembelajaran yang inovatif, menggunakan teknologi dalam pembelajaran, serta mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa secara efektif.
- 3) **Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Pendidikan**  
Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan konten pembelajaran yang interaktif, menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa. Selain itu, digitalisasi pendidikan juga dapat membantu dalam pengelolaan data dan informasi pendidikan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat.
- 4) **Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pendidikan**  
Infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang memadai merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Sekolah perlu dilengkapi dengan fasilitas yang modern, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang memadai, serta akses internet yang cepat. Selain itu, lingkungan sekolah juga perlu dijaga kebersihannya dan keamanannya, agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan aman.
- 5) **Penguatan Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah:**  
Manajemen dan kepemimpinan sekolah yang kuat dan efektif sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kepala sekolah perlu memiliki visi yang jelas, kemampuan manajerial yang baik, serta kemampuan untuk memotivasi guru dan staf. Selain itu, sekolah juga perlu menerapkan sistem manajemen yang transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

### **Otonomi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Otonomi sekolah merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan strategis demi meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya otonomi ini, sekolah dapat menyesuaikan kebijakan dan program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan setempat. Otonomi sekolah memungkinkan fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kurikulum, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan berkualitas. Salah satu aspek penting dalam otonomi sekolah adalah kebebasan dalam pengelolaan kurikulum. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik siswa serta potensi daerahnya. Dengan demikian, peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa depan mereka, baik dalam hal akademik maupun keterampilan non-akademik. Kurikulum yang fleksibel ini juga memungkinkan sekolah untuk mengadopsi inovasi pembelajaran yang lebih efektif. Selain kurikulum, otonomi sekolah juga mencakup pengelolaan keuangan secara mandiri. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana pendidikan serta memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan manajemen keuangan yang baik, sekolah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi siswa dan guru. Dalam hal manajemen tenaga pendidik, otonomi sekolah memberikan kebebasan untuk merekrut, mengembangkan, dan mengevaluasi kinerja guru. Sekolah dapat menentukan strategi pengembangan profesionalisme guru sesuai dengan

kebutuhan spesifik mereka. Dengan adanya pelatihan yang berkelanjutan dan evaluasi yang sistematis, kualitas pengajaran dapat meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada prestasi belajar siswa.

Otonomi sekolah juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Dengan diberikan kewenangan lebih luas, sekolah dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan orang tua, komunitas, dan dunia industri. Kolaborasi ini dapat membantu sekolah dalam penyediaan fasilitas pendidikan, program pelatihan keterampilan, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mendukung perkembangan siswa secara holistik. Meskipun memberikan banyak manfaat, otonomi sekolah juga memiliki tantangan tersendiri. Tidak semua sekolah memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk mengelola otonomi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan pendampingan bagi kepala sekolah dan tenaga pendidik agar mereka mampu menjalankan kebijakan ini dengan baik. Dengan adanya penguatan kapasitas, otonomi sekolah dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam penerapan otonomi sekolah. Kebijakan ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang transparan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki sistem evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa otonomi sekolah benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan sekadar formalitas kebijakan. Secara keseluruhan, otonomi sekolah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan memberikan kewenangan lebih kepada sekolah dalam aspek kurikulum, keuangan, tenaga pendidik, dan partisipasi masyarakat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun, kebijakan ini harus didukung oleh penguatan kapasitas sekolah serta sistem pengawasan yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh semua pihak.

### **Partisipasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Mutu pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran utama dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai upaya strategi. Menurut Tilaar (2002), peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif sekolah dalam pengelolaan dan inovasi pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai standar kualitas yang lebih baik.

#### **1. Esensi Partisipasi Sekolah**

Partisipasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan bukan sekadar kehadiran fisik, tetapi keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan. Ini melibatkan kolaborasi antara kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Partisipasi yang efektif menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan meningkatkan akuntabilitas sekolah.

#### **2. Peran Kepala Sekolah dalam Mendorong Partisipasi**

Kepala sekolah memainkan peran sentral dalam mendorong partisipasi. Menurut Sergiovanni (2009), kepala sekolah transformasional mampu menciptakan visi bersama dan memotivasi semua pihak untuk berkontribusi. Kepala sekolah harus membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi, dan memberdayakan guru serta staf untuk berinovasi dalam pembelajaran.

#### **3. Keterlibatan Guru dalam Peningkatan Mutu**

Guru adalah garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan. Menurut Fullan (2001), guru yang terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum, metode

- pembelajaran, dan evaluasi akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Guru perlu diberi kesempatan untuk berbagi praktik terbaik, mengikuti pelatihan, dan berkolaborasi dalam tim kerja.
4. Partisipasi Siswa sebagai Subjek Pembelajaran  
Siswa bukan hanya objek, tetapi subjek pembelajaran. Menurut Dewey (1938), pendidikan yang bermutu harus berpusat pada siswa, memberikan mereka kesempatan untuk berpikir kritis, berkreasi, dan memecahkan masalah. Partisipasi siswa dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, dan forum diskusi.
  5. Peran Orang Tua dalam Mendukung Pendidikan  
Orang tua adalah mitra penting dalam pendidikan. Menurut Epstein (2001), keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, seperti pertemuan orang tua-guru, kegiatan sukarela, dan dukungan di rumah, dapat meningkatkan prestasi siswa. Sekolah perlu membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
  6. Komite Sekolah sebagai Jembatan Masyarakat  
Komite sekolah berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. Menurut Bryk et al. (2010), komite sekolah yang efektif dapat membantu sekolah dalam menggalang dukungan sumber daya, memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat, dan mengawasi kinerja sekolah. Komite sekolah perlu memiliki anggota yang representatif dan kompeten.
  7. Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Sumber Daya  
Masyarakat dapat berkontribusi dalam penguatan sumber daya sekolah, baik berupa finansial, material, maupun tenaga. Menurut Coleman (1988), modal sosial yang kuat di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah perlu menjalin kemitraan dengan dunia usaha, organisasi sosial, dan tokoh masyarakat untuk mendukung program-program pendidikan.
  8. Dampak Partisipasi terhadap Mutu Pendidikan  
Partisipasi yang luas dan efektif dari semua pemangku kepentingan akan berdampak positif pada mutu pendidikan. Ini akan menciptakan lingkungan belajar yang demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Partisipasi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan prestasi siswa dan reputasi sekolah.

### **Kepimpinan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan**

Kepemimpinan sekolah bukan sekadar jabatan formal, tetapi kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan seluruh komunitas sekolah menuju visi dan misi yang jelas. Kepemimpinan yang efektif menciptakan budaya sekolah yang positif, kolaboratif. Menurut Kouzes dan Posner (2012), pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengartikulasikan visi yang jelas dan menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Dalam konteks sekolah, visi dan misi yang jelas menjadi landasan bagi seluruh program dan kegiatan pendidikan. Bass (1985) mengemukakan konsep kepemimpinan transformasional, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu mengubah dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Kepala sekolah transformasional mampu menciptakan inovasi, memberdayakan guru, dan meningkatkan kapasitas sekolah.

Hallinger (2011) menekankan pentingnya kepemimpinan instruksional, yaitu fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah instruksional terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum, supervisi pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar siswa. Kepemimpinan kolaboratif, yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam

pengambilan keputusan dan pelaksanaan program sekolah. Kepala sekolah kolaboratif membangun tim kerja yang solid, memfasilitasi komunikasi, dan menghargai kontribusi setiap anggota komunitas sekolah. Bryk et al. (2010) menekankan pentingnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan pendidikan. Kepala sekolah yang berorientasi pada data mampu menganalisis data kinerja sekolah, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi yang tepat. Goleman (2004) mengemukakan konsep kepemimpinan emosional, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Kepala sekolah yang adaptif mampu menghadapi perubahan, mengelola konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kepemimpinan sekolah yang kuat dan efektif memiliki dampak yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi guru dan siswa, serta meningkatkan prestasi akademik. Kepemimpinan yang baik juga membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam komunitas sekolah.

## SIMPULAN

Manajemen Berbasis Pendidikan (MBP) merupakan pendekatan strategis yang menekankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu secara menyeluruh. Dengan memberikan otonomi kepada sekolah, pendekatan ini memungkinkan kebijakan dan program pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kondisi lingkungan, asalkan didukung oleh kapasitas institusi dan sistem pengawasan yang baik. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan serta kepemimpinan sekolah yang kuat menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan akuntabel. Penerapan terpadu dari MBP, otonomi sekolah, partisipasi, dan kepemimpinan efektif diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, adaptif, serta menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods*. Pearson/Allyn and Bacon.
- Bryk, A. S., Sebring, P. B., Allensworth, E., Luppescu, S., & Easton, J. Q. (2010). *Organizing schools for improvement: Lessons from Chicago*. University of Chicago Press.
- Caldwell, B. J., & Spinks, J. M. (1992). *Leading the self-managing school*. Falmer Press.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American journal of sociology*, 94, S95-S120.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Denzin, N. K. (1978). *Sociological methods: A sourcebook*. McGraw-Hill.
- Depdiknas. (2004). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep dan pelaksanaan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Epstein, J. L. (2001). *School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools*. Westview Press.
- Fattah, N. (2004). *Ekonomi dan pembiayaan pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2006). *Landasan manajemen pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Fattah, N. (2009). *Manajemen pembiayaan sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Fullan, M. (2001). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- Gaffar, M. F. (1991). *Manajemen pendidikan*. IKIP Bandung.
- Gaspersz, V. (2001). *Total quality management*. Gramedia Pustaka Utama.

- Goleman, D. (2004). What makes a leader?. *Harvard business review*, 82(1), 82-91.
- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. *Journal of educational administration*, 49(2), 125-142.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & evaluation in higher education*, 18(1), 9-34.
- Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2012). *The leadership challenge: How to make extraordinary things happen in organizations*. John Wiley & Sons.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Sallis, E. (2002). *Total quality management in education*. Kogan Page Publishers.
- Sergiovanni, T. J. (2005). *Strengthening the heartbeat: Leading and learning together in schools*. Jossey-Bass.
- Sergiovanni, T. J. (2009). *The principalship: A reflective practice perspective*. Pearson/Allyn and Bacon.
- Siagian, S. P. (2006). *Manajemen pendidikan*. Bumi Aksara.
- Supadi. (2021). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Pustaka Abadi.
- Suparlan. (2013). *Manajemen berbasis sekolah: Dari teori ke praktik*. Bumi Aksara.
- Suryadi, A. (2007). *Manajemen pendidikan di Indonesia*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2010). *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi Aksara.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian pendidikan masa depan*. Remaja Rosdakarya.
- Wahjosumidjo. (2002). *Kepemimpinan kepala sekolah: Tinjauan teoretik dan praktis*. RajaGrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.